



MATERI DASAR PENYULUHAN ANTI KORUPSI

**Oleh
Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA**

Lembaga Sertifikasikas Profesi
Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa



1

**CONTOH-CONTOH BERBAGAI USAHA
MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI**



- ❖ Melakukan tindakan preventif
- ❖ Melakukan edukasi sedini mungkin
- ❖ Pengembalian uang negara
- ❖ Melakukan pengawasan melekat
- ❖ Mensosialisasikan penyuluhan antikorupsi
- ❖ Perbaiki Sistem Pengawasan
- ❖ Mempermudah Sistem Perizinan



2

**TUJUAN AKHIR DARI BERBAGAI USAHA MENCEGAH
DAN MENENTANG KORUPSI**



- ❖ Menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya Good Governance ,
- ❖ Sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya perbuatan korupsi;
 - Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi
 - Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi
 - Terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian manajemen



3

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI



- ❖ Menurunnya prosentase tindak pidana korupsi
- ❖ Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Menguat
- ❖ Pengembalian Uang Negara Meningkatkan
- ❖ Sistem Pengawasan Melekat Pada Instansi-Instansi Efektivitasnya Meningkatkan



4

**REFERENSI/ROLE MODEL
NEGARA/DAERAH/INSTANSI YANG ANTIKORUPSI**



- ❖ Denmark
- ❖ Finlandia
- ❖ Norwegia
- ❖ Swedia



BELAJAR KEPADA NEGARA-NEGARA YANG IPK-NYA TINGGI

Denmark, IPK 90 di tahun 2016

Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap Lembaga pemerintahan. Pemerintah Denmark menerapkan Keterbukaan Politik dengan memodernisasi sector public dan manajemen sumber daya public melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan antikorupsi, partisipasi warga dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark Gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa.

Denmark memperoleh hadiah 14 Nobel.



BELAJAR KEPADA NEGARA-NEGARA YANG INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)-NYA TINGGI (*LANJUTAN*)

Finlandia, IPK 89 di tahun 2016

Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Implementasi undang-undang antikorupsi sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik.

Finlandia memiliki SDM yang unggul dan kompeten.

Sistem pendidikannya juga menjadi kiblat dunia.

Penemuan di bidang Teknologi Informasi biasa dikatakan pioneer. Bahkan Nokia, perusahaan gadget asal negara ini menjadi legenda untuk bisnis gadget dunia.



Referensi Role Model Anti Korupsi

- IACC Hong Kong Independent Commission Against Corruption
- CPIB - Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura
- NCCC - National Counter Corruption Commission - Thailand
- Bianco Madagaskar Biro Independen Anti-Korupsi Madagaskar (Bianco)
- Anti Corruption Commission - ACC – Zambia
- KACA (Kenya Anti-Corruption Authority)
- Prevention and Combating of Corruption Bureau [PCB] Tanzania



5

DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI BIDANG/SECTOR



- ❖ Harga Alat-alat kesehatan Mahal
- ❖ Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan
- ❖ Meningkatnya angka kematian bayi
- ❖ Penurunan kualitas gizi anak
- ❖ Meningkatnya angka putus sekolah
- ❖ Tingkat Pengangguran yang tinggi
- ❖ Tingginya Biaya Pendidikan



6

**PERBANDINGAN ANTARA KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DENGAN HUKUMAN FINANSIAL KORUPTOR**



Kerugian Negara VS Hukuman Koruptor

- ❑ Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa
- ❑ Tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi
- ❑ Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan

Pengenaan Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan Terpidana Korupsi

Jenis Pekerjaan	Kerugian Negara (triliun) (A)	Tuntutan Jaksa (triliun) (B)	Persentase/% (B/A)	Putusan Pengadilan (triliun) (C)	Persentase/% (C/A)
 PNS	21,27	1,04	4,89	0,84	3,95
 BUMN/D	4,46	2,44	54,71	2,11	47,31
 Lembaga Independen	52,37	17,05	32,56	0,30	0,57
 Legislatif	1,63	0,54	33,13	0,40	24,54
 Kepala Daerah	1,39	0,88	63,31	0,77	55,40
 Swasta/ Lainnya	47,11	7,79	16,54	9,13	19,38
Total	128,23	29,74	23,19	13,55	10,57

Sumber: Data Putusan MA (2014)



7

PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI



BIAYA SOSIAL AKIBAT KORUPSI

- ❖ Biaya Penegakan Hukum
- ❖ Pencegahan Korupsi
- ❖ Biaya Penahanan dan Biaya Penjara
- ❖ Biaya Pengadilan serta Biaya Jaksa



8

HUBUNGAN ANTARA DAMPAK KORUPSI, BIAYA SOSIAL KORUPSI, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Hubungan Antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi

Akibat kejahatan Koruptor

- Pelayanan Publik tak kunjung membaik,
- Pelayanan kesehatan mahal
- Biaya pendidikan semakin mahal
- Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan
- Meningkatnya besaran pajak
- Biaya sosial korupsi



9

Pengertian Korupsi



Korupsi

- Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “**corrumpere**”, “**corruptio**” atau “**corruptus**”
- Dari bahasa latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia
- Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi
- **Korup** = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa indonesia, 1991)
- **Korup** = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002)
- **Korup** = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 19



10

FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI



Teori Penyebab Korupsi

- Teori Korupsi Robert Klitgaard CDMA Theory
- Teori korupsi Jack Bologne Gone Theory
- Teori Korupsi Donald R Cressey Fraud Triangle Theory
- Teori Willingness and Opportunity to Corrupt
- Berdasarkan Motivasi Pelaku
- Teori Cost – Benefit Model





11

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Pemberantasan Korupsi

- Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi I upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU 30/2002 pasal1 butir 3)
- Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi



Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- ❑ UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
- ❑ UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- ❑ Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2000
 - ❑ tentang tata cara pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- ❑ UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi



Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- Uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Uu no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn
- Ketetapan MPR no. X /MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
- UU no. 13 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi



12

**30 DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENGELOMPOKANNYA**



Bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi

- Ada 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001.
- Kemudian ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok



7 Kelompok Tindak Pidana Korupsi [Menurut UU Tipikor]

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.



13

**Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin,
Pemerasan, dan Suap**



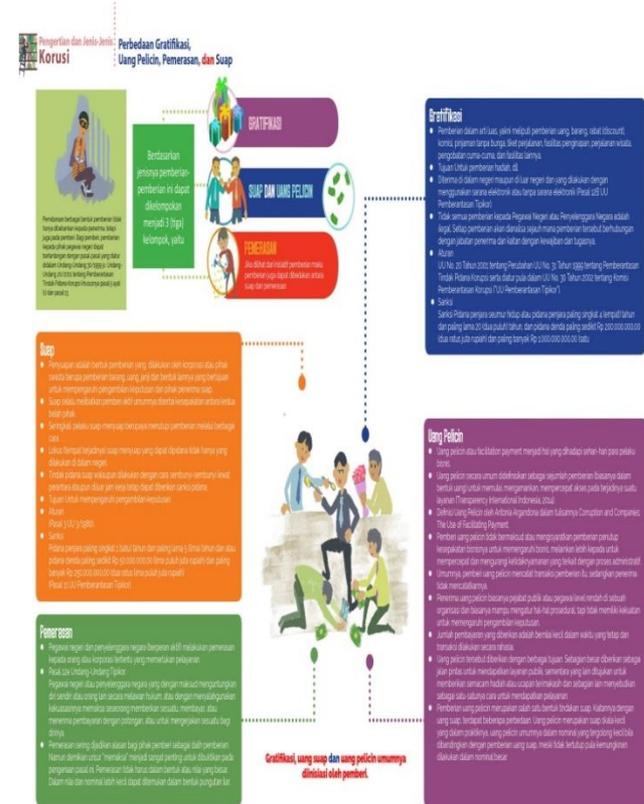
Gratifikasi, Suap dan Uang Pelicin, Pemasaran

3 Kelompok Jenis Pemberian

❖ Gratifikasi

❖ Suap dan Uang Pelicin

❖ Pemasaran





14

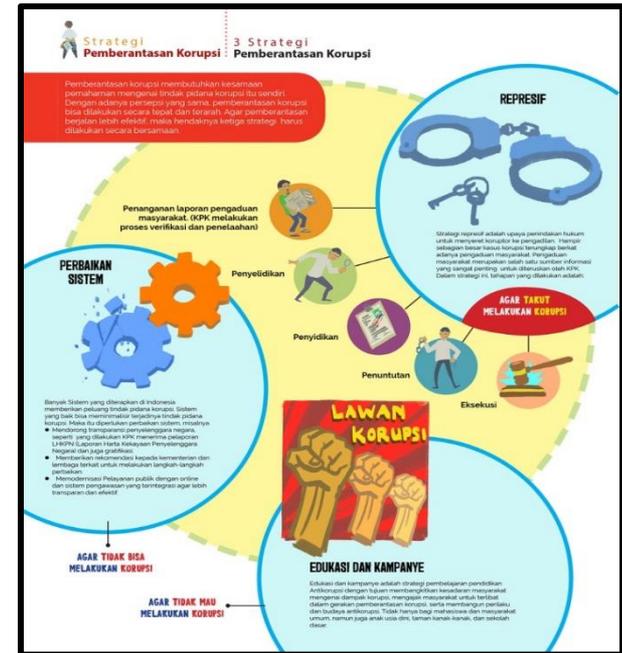
STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI



Strategi Pencegahan Korupsi

3 Strategi Pemberantasan korupsi:

- Represif
- Perbaiki sistem
- Edukasi dan kampanye





Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

S M A R T

- ❖ Specific
- ❖ Measurable
- ❖ Attainable
- ❖ Relevant
- ❖ Timely



15

INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI



Integritas

- Integritas
 - Adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).
 - Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK



Nilai Antikorupsi

- Nilai antikorupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut Kelompok Sasaran agar berperilaku antikorupsi.
- Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain meliputi : kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan



Nilai Antikorupsi

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

Keadilan

JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL



TERIMAKASIH

Lembaga Sertifikasikas Profesi
Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa